



**LEMBAR SOAL**  
**ASESMEN SUMATIF AKHIR SEMESTER**  
**SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU**  
**TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila  
Kelas / Program :

Hari / Tanggal :  
Waktu : 0 menit

**Perhatikan soal dengan baik dan jawablah sesuai ketentuan !**

**1. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Pancasila dianggap sebagai jiwa bangsa Indonesia, dengan alasan ....

- A. nilai-nilai Pancasila digali dari BPUPKI
- B. Pancasila adalah kesadaran kolektif masyarakat Indonesia
- C. nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sejak dahulu
- D. Pancasila merupakan hasil kerja keras bangsa Indonesia selama penjajahan
- E. Pancasila disahkan sebagai dasar negara oleh PPKI yang mewakili rakyat Indonesia

**KUNCI : C**

**Pembahasan**

**2. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Pancasila mencerminkan integritas dari nilai kodrati manusia. Berikut yang merupakan nilai kodrati yang mewakili sila keempat Pancasila adalah ....

- A. manusia sebagai makhluk sosial
- B. mengembangkan rasa kemanusiaan
- C. terpenuhinya sandang, pangan, dan papan
- D. manusia hidup dengan kepentingan bersama
- E. manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

**KUNCI : D**

**Pembahasan**

**3. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah menerapkan proses musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi merupakan bagian dari identitas masyarakat Indonesia.

Berikut yang bukan contoh penerapan identitas tersebut adalah ....

- A. calon Ketua OSIS akan dipilih oleh seluruh siswa di sekolah
- B. SMA Jaya mengadakan pemilihan ketua kelas yang dilakukan secara voting
- C. wali kelas melakukan pemilihan petugas piket berdasarkan data siswa di kelas
- D. setiap ekstra kurikuler memiliki ketua yang dipilih dari pendapat seluruh anggota
- E. pemilihan Kepala Sekolah SMA Tunas Bangsa diusulkan oleh orang tua dan alumni

**KUNCI : E**

**Pembahasan**

**4. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam implementasinya, nilai Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan ....

- A. oligarki
- B. demokrasi
- C. aristokrasi
- D. monarki absolut
- E. monarki konstitusional

**KUNCI : B**

**Pembahasan**

**5. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Upaya penerapan nilai kepribadian bangsa Indonesia sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ....

- A. mendisiplinkan waktu belajar
- B. membantu teman di sekolah
- C. memupuk diri dengan akhlak yang baik
- D. melestarikan gotong royong dan kerjasama
- E. menegakkan ajaran agama dengan berbagai cara

**KUNCI : C**

## Pembahasan

### 6. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

#### Pertanyaan:

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk yang besar. Hal tersebut berpotensi menjadi kelemahan Indonesia dalam berbagai sektor jika tidak dikelola dengan baik. Berikut ini termasuk kelemahan yang timbul dari internal negara Indonesia adalah ... .

- A. campur tangan asing dalam penyelesaian internal Indonesia
- B. pelanggaran wilayah territorial yang dilakukan oleh negara-negara tetangga
- C. ketidakstabilan ekonomi global berdampak negatif pada perekonomian Indonesia
- D. mudahnya pencari suaka memasuki wilayah Indonesia untuk mencari tempat tinggal
- E. konflik yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan Indonesia

KUNCI : D

## Pembahasan

### 7. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

#### Pertanyaan:

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi infrastruktur yang kurang memadai adalah ... .

- A. memperbaiki kualitas pendidikan
- B. investasi dalam pembangunan infrastruktur
- C. melakukan pemberdayaan ketrampilan masyarakat
- D. menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak
- E. pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KUNCI : B

## Pembahasan

### 8. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

#### Pertanyaan:

Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi daya tarik bagi masuknya investasi asing. Hal ini merupakan peluang Indonesia untuk meningkatkan ... .

- A. pertumbuhan perekonomian
- B. perdagangan internasional
- C. kualitas pendidikan
- D. sumber daya alam
- E. pariwisata

KUNCI : A

## Pembahasan

### 9. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

#### Pertanyaan:

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

- 1) Masuknya berbagai ideologi asing yang dapat mempengaruhi pandangan hidup bangsa Indonesia.
- 2) Terbukanya wawasan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa asing.
- 3) Kebocoran data pribadi di media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Kesenjangan terhadap akses perangkat digital dan koneksi internet.
- 5) Ancaman atas kedaulatan dokumen rahasia negara.

Pernyataan yang menunjukkan tantangan bagi bangsa Indonesia akibat kemajuan teknologi ditunjukkan oleh nomor ... .

- |                |                |
|----------------|----------------|
| A. 1, 2, dan 3 | D. 1, 3, dan 4 |
| B. 1, 2, dan 4 | E. 1, 3, dan 5 |
| C. 1, 2, dan 5 |                |

KUNCI : E

## Pembahasan

### 10. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

#### Pertanyaan:

Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia sehingga memiliki peluang untuk memajukan Negara Indonesia. Namun, peluang tersebut dapat terhambat akibat beberapa faktor. Berikut ini yang menjadi faktor penghambat peluang tersebut adalah ....

- A. terjadinya kebersihan lingkungan di tempat wisata
- B. tersedianya anggaran untuk perawatan tempat wisata
- C. meningkatnya investasi asing dalam sektor pariwisata
- D. kualitas pelayanan yang kurang memuaskan bagi wisatawan
- E. pembangunan infrastruktur jalan yang memudahkan akses menuju lokasi wisata

KUNCI : D

## Pembahasan

### 11. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

#### Pertanyaan:

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kualitas ... .

- A. pariwisata
- B. kesehatan

- C. perindustrian
- D. perekonomian
- E. sumber daya manusia

**KUNCI : E**  
**Pembahasan**

**12. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Melakukan refleksi sangatlah penting. Salah satu dampak tidak melakukan refleksi adalah . . .

- A. mendapatkan pencerahan hidup
- B. akan terhindar dari sanksi atau hukuman
- C. menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa
- D. seringkali terjebak dalam kesalahan yang sama
- E. dapat menyelesaikan masalah dengan lebih bijaksana

**KUNCI : D**  
**Pembahasan**

**13. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Cermatilah teks bacaan "Tujuh Upaya Menghadapi Globalisasi" berikut ini untuk menjawab pertanyaan yang menyertainya!

**Tujuh Upaya Menghadapi Globalisasi**

Globalisasi menjadi tantangan besar bagi tiap bangsa. Tidak mungkin bangsa di dunia menutup diri dari hubungan dengan bangsa lain. Oleh karena itu negara harus mampu menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subyek globalisasi. Semua negara harus bekerjasama dalam era globalisasi saat ini. Tujuh upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi adalah sebagai berikut.

Mencintai produk dalam negeri

Sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala Barat yang berlebihan. Contohnya menggunakan pakaian batik atau pakaian adat dan membeli makanan yang diproduksi unit usaha lokal.

Menyaring budaya asing

Untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai kebudayaan lokal. Artinya, tidak semua kebudayaan asing bisa diterima. Kita harus menyaringnya menggunakan nilai, norma, atau kaidah sosial yang berlaku.

Memahami nilai kebangsaan dan Pancasila

Cinta akan nilai-nilai Pancasila membantu kita untuk tetap menghormati kebudayaan Indonesia meski sudah banyak budaya asing yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Selain masyarakat, pemerintah juga harus bertanggungjawab dalam menerapkan dan mengajarkan nilai kebangsaan serta Pancasila.

Meningkatkan daya potensi nasional

Dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Kualitas sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam membuat bangsa Indonesia tidak perlu lagi bergabung pada pihak asing.

Kemajuan teknologi dalam pembangunan

Misal, menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Penggunaan teknologi ini harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Meningkatkan pengembangan usaha mikro

Indonesia memiliki potensi dan kekuatan ke ranah usaha mikro. Adapun usaha mikro memiliki beberapa keunggulan., seperti penyedia barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor, efisiensi, dan fleksibilitas yang tinggi, semangat usaha tinggi, profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan pengembalian pinjaman yang tinggi.

Memanfaatkan forum kerja sama internasional

Bertujuan untuk memperdalam kerjasama yang saling menguntungkan, mendorong proses globalisasi perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan teknologi.

Sumber: kompas.com

Berdasarkan teks bacaan "Tujuh Upaya Menghadapi Globalisasi" tentukan kesesuaian antara pernyataan dengan bacaan!

Menggunakan batik atau pakaian adat merupakan upaya bangsa Indonesia menghadapi globalisasi.

- A. sesuai
- B. tidak sesuai

**KUNCI : A**  
**Pembahasan**

#### 14. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

### **Pertanyaan:**

Cermatilah teks bacaan "Tujuh Upaya Menghadapi Globalisasi" berikut ini untuk menjawab pertanyaan yang menyertainya!

## Tujuh Upaya Menghadapi Globalisasi

Globalisasi menjadi tantangan besar bagi tiap bangsa. Tidak mungkin bangsa di dunia menutup diri dari hubungan dengan bangsa lain. Oleh karena itu negara harus mampu menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subyek globalisasi. Semua negara harus bekerjasama dalam era globalisasi saat ini. Tujuh upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi adalah sebagai berikut.

Mencintai produk dalam negeri

Sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala Barat yang berlebihan. Contohnya menggunakan pakaian batik atau pakaian adat dan membeli makanan yang diproduksi unit usaha lokal.

### Menyaring budaya asing

Untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai kebudayaan lokal. Artinya, tidak semua kebudayaan asing bisa diterima. Kita harus menyaringnya menggunakan nilai, norma, atau kaidah sosial yang berlaku.

## Memahami nilai kebangsaan dan Pancasila

Cinta akan nilai-nilai Pancasila membantu kita untuk tetap menghormati kebudayaan Indonesia meski sudah banyak budaya asing yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Selain masyarakat, pemerintah juga harus bertanggungjawab dalam menerapkan dan mengajarkan nilai kebangsaan serta Pancasila.

Meningkatkan daya potensi nasional

Dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, sudah seharusnya Indoneisa menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Kualitas sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam membuat bangsa Indonesia tidak perlu lagi bergabung pada pihak asing.

Kemajuan teknologi dalam pembangunan

Misal, menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Penggunaan teknologi ini harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Meningkatkan pengembangan usaha mikro

Indonesia memiliki potensi dan kekuatan ke ranah usaha mikro. Adapun usaha mikro memiliki beberapa keunggulan., seperti penyedia barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor, efisiensi, dan fleksibelitas yang tinggi, semangat usaha tinggi, profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan pengembalian pinjaman yang tinggi.

Memanfaatkan forum kerja sama internasional

Bertujuan untuk memperdalam kerjasama yang saling menguntungkan, mendorong proses globalisasi perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan teknologi.

Sumber: kompas.com

Berdasarkan teks bacaan "Tujuh Upaya Menghadapi Globalisasi" tentukan kesesuaian antara pernyataan dengan bacaan!

Cinta akan nilai-nilai Pancasila membantu untuk tetap menghormati budaya Indonesia.

- A. sesuai B. tidak sesuai

## KUNCI : A

## Pembahasan

### **15. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

### **Pertanyaan:**

Cermatilah teks bacaan "Tujuh Upaya Menghadapi Globalisasi" berikut ini untuk menjawab pertanyaan yang menyertainya!

## Tujuh Upaya Menghadapi Globalisasi

Globalisasi menjadi tantangan besar bagi tiap bangsa. Tidak mungkin bangsa di dunia menutup diri dari hubungan dengan bangsa lain. Oleh karena itu negara harus mampu menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subyek globalisasi. Semua negara harus bekerjasama dalam era globalisasi saat ini. Tujuh upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi adalah sebagai berikut.

Mencintai produk dalam negeri

Sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala Barat yang berlebihan. Contohnya menggunakan pakaian batik atau pakaian adat dan membeli makanan yang diproduksi unit usaha lokal.

### Menyaring budaya asing

Untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai kebudayaan lokal. Artinya, tidak semua kebudayaan asing bisa diterima. Kita harus menyaringnya menggunakan nilai, norma, atau kaidah sosial yang berlaku.

#### **Memahami nilai kebangsaan dan Pancasila**

Cinta akan nilai-nilai Pancasila membantu kita untuk tetap menghormati kebudayaan Indonesia meski sudah banyak budaya asing yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Selain masyarakat, pemerintah juga harus bertanggungjawab dalam menerapkan dan mengajarkan nilai kebangsaan serta Pancasila.

Meningkatkan daya potensi nasional

Dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, sudah seharusnya Indoneisa menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Kualitas sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam membuat bangsa Indonesia tidak perlu lagi bergabung pada pihak asing.

#### Kemajuan teknologi dalam pembangunan

Misal, menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Penggunaan teknologi ini harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Meningkatkan pengembangan usaha mikro

Indonesia memiliki potensi dan kekuatan ke ranah usaha mikro. Adapun usaha mikro memiliki beberapa keunggulan., seperti penyedia barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor, efisiensi, dan fleksibilitas yang tinggi, semangat usaha tinggi, profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan pengembalian pinjaman yang tinggi.

Memanfaatkan forum kerja sama internasional

Bertujuan untuk memperdalam kerjasama yang saling menguntungkan, mendorong proses globalisasi perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan teknologi.

Sumber: kompas.com

Berdasarkan teks bacaan "Tujuh Upaya Menghadapi Globalisasi" tentukan kesesuaian antara pernyataan dengan bacaan!

Usaha mikro Indonesia sulit berkembang karena efisiensi dan fleksibilitas serta semangat kerja yang rendah.

- A. sesuai B. tidak sesuai

## KUNCI : A

## Pembahasan

## 16. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

### **Pertanyaan:**

Cermatilah teks bacaan "Tujuh Upaya Menghadapi Globalisasi" berikut ini untuk menjawab pertanyaan yang menyertainya!

## **Tujuh Upaya Menghadapi Globalisasi**

Globalisasi menjadi tantangan besar bagi tiap bangsa. Tidak mungkin bangsa di dunia menutup diri dari hubungan dengan bangsa lain. Oleh karena itu negara harus mampu menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subyek globalisasi. Semua negara harus bekerjasama dalam era globalisasi saat ini. Tujuh upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi adalah sebagai berikut.

Mencintai produk dalam negeri

Sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala Barat yang berlebihan. Contohnya menggunakan pakaian batik atau pakaian adat dan membeli makanan yang diproduksi unit usaha lokal.

### Menyaring budaya asing

Untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai kebudayaan lokal. Artinya, tidak semua kebudayaan asing bisa diterima. Kita harus menyaringnya menggunakan nilai, norma, atau kaidah sosial yang berlaku.

## Memahami nilai kebangsaan dan Pancasila

Cinta akan nilai-nilai Pancasila membantu kita untuk tetap menghormati kebudayaan Indonesia meski sudah banyak budaya asing yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Selain masyarakat, pemerintah juga harus bertanggungjawab dalam menerapkan dan mengajarkan nilai kebangsaan serta Pancasila.

Meningkatkan daya potensi nasional

Dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, sudah seharusnya Indonesia menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Kualitas sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam membuat bangsa Indonesia tidak perlu lagi bergabung pada pihak asing.

Kemajuan teknologi dalam pembangunan Miskin dan dilakukannya insafasi

Misal, menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Penggunaan teknologi ini harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Meningkatkan pengembangan usaha mikro

Indonesia memiliki potensi dan kekuatan ke ranah usaha mikro. Adapun usaha mikro memiliki beberapa keunggulan seperti penyedia barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor, efisiensi, dan fleksibilitas yang tinggi, semangat usaha tinggi, profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan pengembalian pinjaman yang tinggi.

Memanfaatkan forum kerja sama internasional

Bertujuan untuk memperdalam kerjasama yang saling menguntungkan, mendorong proses globalisasi perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan teknologi.

Sumber: kompas.com

Berdasarkan teks bacaan "Tujuh Upaya Menghadapi Globalisasi" tentukan kesesuaian antara pernyataan dengan bacaan!

Forum kerjasama internasional dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses globalisasi perdagangan dan investasi

- A. sesuai B. tidak sesuai

## KUNCI : A

## Pembahasan



- A. intoleransi
- B. radikalisme
- C. individualisme
- D. kosmopolitanisme
- E. fundamentalisme pasar

**KUNCI : A**

**Pembahasan**

**21. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai pandangan hidupnya, Hal ini berarti bangsa Indonesia . . .

- A. tidak perlu mengetahui ideologi lain
- B. bebas menentukan sikap terhadap bangsa lain di dunia
- C. mempunyai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa
- D. tidak perlu menjalin kerjasama dengan negara yang pernah menjajah Indonesia
- E. telah menunjukkan kepada dunia akan keberhasilannya dalam berjuang melawan penjajah

**KUNCI : C**

**Pembahasan**

**22. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Pemerintahan bersih tanpa adanya tindakan korupsi merupakan penerapan Pancasila khususnya sila . . .

- A. Ketuhanan Yang Maha Esa
- B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- C. Persatuan Indonesia
- D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan/permusuhan/permusuhan
- E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

**KUNCI : E**

**Pembahasan**

**23. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Berikut yang bukan merupakan peluang penerapan Pancasila pada zaman sekarang adalah . . .

- A. menyebarkan berita hoax yang meresahkan masyarakat
- B. membantu sesama dengan cepat melalui media sosial
- C. mengenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia
- D. menyebarkan kebaikan menggunakan teknologi
- E. menggunakan teknologi untuk kegiatan donasi

**KUNCI : A**

**Pembahasan**

**24. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Perkembangan dan kemajuan iptek sangat mendukung upaya ketergantungan di berbagai aspek kehidupan global. Namun ada dampak negatif yang harus diwaspadai yaitu . . .

- A. dapat memanfaatkan waktu
- B. bersikap individualis
- C. saling bekerjasama
- D. hidup teratur
- E. berdisiplin

**KUNCI : B**

**Pembahasan**

**25. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Pada era globalisasi sekarang ini, sangat mudah bagi masyarakat untuk mencari informasi mengenai kehidupan negara-negara di dunia. Banyak masyarakat yang meniru kehidupan masyarakat global seperti sikap individualis, konsumisme, dan glamour. Tindakan yang sebaiknya kita lakukan adalah . . .

- A. menolak semua budaya asing
- B. langsung menerima budaya asing
- C. mempelajari dan mengembangkan budaya asing
- D. menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa
- E. menerima kebudayaan asing yang lebih menguntungkan pribadi

**KUNCI : D**

**Pembahasan**

**26. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Sesuatu hal yang dimiliki manusia tanpa terkecuali yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan keberadaannya wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun karena merupakan harkat dan martabatnya sebagai manusia merupakan pengertian ... .

- A. hak warga negara
- B. hak asasi manusia
- C. kewajiban warga negara
- D. kewajiban asasi manusia
- E. kewajiban dasar manusia

**KUNCI : B**

**Pembahasan**

**27. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

- 1) Tidak memiliki SIM saat mengendarai kendaraan bermotor
- 2) Melakukan vandalisme terhadap fasilitas umum
- 3) Melakukan tindakan bullying di sekolah
- 4) Menyontek saat ujian sekolah
- 5) Menyela antrian orang lain

Pernyataan yang merupakan contoh pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah ... .

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 2, dan 5
- C. 1, 3, dan 5
- D. 2, 3, dan 4
- E. 3, 4, dan 5

**KUNCI : B**

**Pembahasan**

**28. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Hak atas kebebasan berserikat merupakan salah satu hak yang termasuk dalam ruang lingkup kovenan hak sipil dan politik. Berikut yang menunjukkan penerapan hak atas kebebasan berserikat di sekolah adalah ... .

- A. berdiskusi dalam menentukan ketua kelas
- B. mengikuti kegiatan OSIS atau ekstra kurikuler
- C. mengikuti segala tata tertib dan peraturan sekolah
- D. bertanya kepada guru tentang materi yang belum dikuasai
- E. membersihkan ruang kelas sesuai jadwal yang telah diatur

**KUNCI : B**

**Pembahasan**

**29. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Masih terdapat ruang publik yang tidak ramah untuk penyandang disabilitas. Beberapa ruang publik masih mengutamakan estetika dibandingkan kegunaannya. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas tidak dapat bergerak bebas Ketika sedang berada di ruang publik . Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran hak warga negara yang termasuk bentuk ... .

- A. genosida
- B. persekusi
- C. deskriminasi
- D. cyber bullying
- E. intoleransi beragama

**KUNCI : C**

**Pembahasan**

**30. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Berikut yang merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia berat adalah ... .

- A. terlambat membayar pajak kendaraan sampai batas waktu yang telah ditentukan
- B. pembersihan etnis yang dilakukan suatu kelompok terhadap kelompok lain
- C. melanggar peraturan lalu lintas dengan tidak menggunakan helm
- D. menyebarkan berita hoax di media sosial untuk menjatuhkan
- E. Ibu yang sedang memarahi anaknya yang tidak mau belajar

**KUNCI : B**

**Pembahasan**

**31. Tipe Soal: PILIHAN GANDA****Pertanyaan:**

Selebgram merupakan salah satu profesi yang berkaitan erat dengan media sosial. Profesi ini sering kali menunjukkan gaya hidupnya di media sosial untuk membangun citra positif pada dirinya. Akan tetapi, profesi ini rentan sekali mendapat ujaran kebencian dari orang yang tidak dikenal di media sosial. Bentuk pelanggaran hak warga negara yang terjadi pada ilustrasi tersebut adalah ... .

- A. intoleransi beragama
- B. cyberbullying
- C. diskriminasi
- D. persekusi
- E. genosida

**KUNCI : B****Pembahasan****32. Tipe Soal: PILIHAN GANDA****Pertanyaan:**

Salah satu hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Berikut yang merupakan upaya yang dapat dilakukan warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara ialah ... .

- A. taat membayar pajak sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- B. membangun kekuatan militer dengan memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista)
- C. menjaga wilayah perbatasan dengan melakukan patroli di sepanjang batas wilayah kedaulatan
- D. menjadi garda terdepan dalam mengamankan aksi demonstrasi yang berpotensi terjadi tindakan anarkis
- E. menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik regional dan internasional dalam menjaga perdamaian dunia

**KUNCI : D****Pembahasan****33. Tipe Soal: PILIHAN GANDA****Pertanyaan:**

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

- 1) Bersifat absolut karena meliputi hak-hak fundamental
  - 2) Dalam keadaan apapun, pemenuhan hak tidak boleh dibatasi
  - 3) Dapat dibatasi dan dikurangi oleh negara dalam keadaan darurat
  - 4) Hak tidak dicabut oleh negara tetapi hanya dibatasi dan dikurangi
  - 5) Hak yang melindungi keberlangsungan hidup serta menjaga martabat manusia
- Pernyataan yang tepat mengenai non-derogable rights ditunjukkan oleh pernyataan nomor ... .
- |                |                |
|----------------|----------------|
| A. 1, 2, dan 3 | D. 2, 3, dan 5 |
| B. 1, 2, dan 5 | E. 3, 4, dan 5 |
| C. 2, 3, dan 4 |                |

**KUNCI : B****Pembahasan****34. Tipe Soal: PILIHAN GANDA****Pertanyaan:**

Berikut alasan perundungan termasuk pelanggaran hak non derogable adalah ... .

- A. memicu terjadinya kesalahpahaman
- B. merampas hak hidup seseorang
- C. menghambat penegakan HAM
- D. mengancam keutuhan negara
- E. memecah belah bangsa

**KUNCI : B****Pembahasan****35. Tipe Soal: PILIHAN GANDA****Pertanyaan:**

Alasan intoleransi menjadi ancaman yang nyata bagi penggunaan hak asasi manusia adalah ... .

- A. menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat
- B. lunturnya nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan
- C. memicu terjadinya demonstrasi terhadap pemerintah
- D. menguatnya solidaritas antarsesama anggota kelompok
- E. kelompok minoritas mendominasi kelompok mayoritas

**KUNCI : B****Pembahasan****36. Tipe Soal: PILIHAN GANDA****Pertanyaan:**

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban merupakan sumber dari permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini yang merupakan contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang berkaitan dengan kewajiban seseorang terhadap negara adalah ... .

- A. melakukan perusakan terhadap fasilitas umum
- B. menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin

- C. melakukan bullying terhadap penyandang disabilitas
- D. melakukan tindakan penipuan untuk keuntungan pribadi
- E. menyebarkan berita hoax untuk merusak nama baik seseorang

**KUNCI : A**

**Pembahasan**

**37. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Berikut yang merupakan faktor yang mendorong seseorang melakukan perundungan adalah ... .

- A. penggunaan media sosial untuk menambah ilmu pengetahuan
- B. lingkungan yang tertib dan taat terhadap norma yang berlaku
- C. menerima perlakuan yang tidak baik dari orang tua
- D. terjalin keharmonisan antar anggota keluarga
- E. kelompok pertemanan yang baik dan sehat

**KUNCI : C**

**Pembahasan**

**38. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Seorang aktivis lingkungan ditangkap oleh aparat keamanan saat melakukannya penolakan terkait penebangan hutan secara illegal. Aktivis tersebut tidak diberi kesempatan didampingi pengacara yang akan membela haknya. Keluarganya pun tidak diberi informasi mengenai keberadaannya. Berdasarkan teks tersebut, hak asasi yang dilanggar adalah ... .

- A. hak untuk memperoleh informasi
- B. hak untuk tidak disiksa dan diperbudak
- C. hak untuk mendapatkan bantuan hukum
- D. hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan
- E. hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

**KUNCI : C**

**Pembahasan**

**39. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Perhatikan pernyataan tentang prinsip dasar hak asasi manusia berikut!

- 1) Telah ada sejak manusia berada dalam kandungan
- 2) Berlaku untuk seluruh manusia tanpa kriteria tertentu
- 3) Dapat dikurangi atas kemauan dari manusia itu sendiri
- 4) Kepemilikannya hanya bisa dicabut jika melanggar hukum
- 5) Bersifat tetap sehingga tidak bisa dihilangkan oleh siapapun juga

Berdasarkan pernyataan di atas, yang sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia adalah nomor ... .

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 2, dan 4
- C. 1, 2, dan 5
- D. 2, 3, dan 4
- E. 2, 3, dan 5

**KUNCI : C**

**Pembahasan**

**40. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Dalam sebuah rapat warga, keputusan hanya diambil oleh kelompok mayoritas tanpa mempertimbangkan pendapat minoritas. Berdasarkan prinsip hak warga negara menurut UUD NRI 1945, kondisi tersebut menunjukkan ... .

- A. terjadi pengabaian hak menyampaikan pendapat
- B. warga wajib mengikuti keputusan tanpa syarat
- C. hak berpendapat telah terpenuhi sepenuhnya
- D. hak minoritas tidak perlu dipertimbangkan
- E. kewajiban bela negara lebih penting

**KUNCI : A**

**Pembahasan**

**41. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Sebuah kasus hukum melibatkan seorang pejabat pemerintah dan seorang buruh pabrik. Dalam persidangan, hakim memutuskan untuk memperlakukan keduanya setara di mata hukum tanpa pandangan bulu. Prinsip persamaan kedudukan di mata hukum seperti yang terjadi dalam kasus tersebut dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 pasal ... .

- A. pasal 27 ayat (1)
- B. pasal 28 ayat (1)
- C. pasal 28D ayat (1)
- D. pasal 29 ayat (1)
- E. pasal 30 ayat (1)

**KUNCI : A**

**Pembahasan**

**42. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Di tengah ancaman terorisme, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pemuda dan pelajar, untuk aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masing-masing. Ajakan pemerintah tersebut merujuk pada hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ... .

- A. pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1)
- B. pasal 28 ayat (1) dan pasal 28J ayat (2)
- C. pasal 28I ayat (4) dan pasal 34 ayat (2)
- D. pasal 29 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1)
- E. pasal 33 ayat (4) dan pasal 34 ayat (3)

**KUNCI : A**

**Pembahasan**

**43. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Sebuah perusahaan mengumumkan lowongan kerja dengan syarat "hanya untuk pelamar dengan agama X". Kebijakan ini menuai protes karena dianggap diskriminatif. Kebijakan perusahaan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal ... .

- A. pasal 28J ayat (1) tentang kewajiban menghormati hak orang lain
- B. pasal 28I ayat (2) tentang hak bebas dari perlakuan diskriminatif
- C. pasal 28D ayat (1) tentang pengakuan di hadapan hukum
- D. pasal 28E ayat (1) tentang kebebasan memilih pekerjaan
- E. pasal 29 ayat (2) tentang kebebasan beribadah

**KUNCI : A**

**Pembahasan**

#### 44. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

##### Pertanyaan:

Perhatikan Infografis "Pasal-pasal Bermasalah Pada ITE" berikut untuk menjawab pertanyaan yang menyertai! Berdasarkan infografis "Pasal-Pasal Bermasalah Pada ITE" dinyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang defamasi sering dianggap bermasalah karena ....

## Pasal-pasal Bermasalah pada UU ITE

\*Sumber diolah dari SAFEnet

**Klaster pertama: Kejahatan siber**

- Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan;
- Pasal 27 ayat (3) tentang defamasi;
- Pasal 28 ayat (2) tentang permusuhan dan kebencian;
- Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 tentang ancaman.

**"Selain rumusan pasal yang tidak rigid sehingga menimbulkan multtafsir, pasal-pasal ini juga memiliki problem yuridis karena menimbulkan duplikasi aturan sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya pasal-pasal di klaster ini sebaiknya dihapuskan."**

Damar Juniarto - Direktur Eksekutif SAFEnet

**Klaster kedua: Ancaman pidana**

- Pasal 36 sebagai pemberat hukuman atas tindak pidana Pasal 27 sampai Pasal 29. Rumusan pasal ini perlu dibatasi secara tegas, hanya dalam konteks hubungan konsumen dengan produsen.
- Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang ancaman pidana penjara bagi tindakan defamasi sebaiknya dihapus atau diubah pengaturannya mengikuti hukum perdata sebagaimana yang kini tengah menjadi tren hukum di masa modern.

**Klaster ketiga: Pasal-pasal rentan disalahgunakan**

- Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi berpotensi dapat digunakan untuk melakukan sensor informasi alih-alih menjadi pengakuan atas hak privasi warga.
- Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) tentang kewenangan pemerintah dan pemutusan akses berpotensi melahirkan perbuatan yang sewenang-wenang dan pemerintah dapat memutus akses tanpa pengawasan.

### Sementara itu....

Pemerintah juga mencatat terdapat sejumlah pasal dalam UU ITE yang seringkali menuai permasalahan, antara lain:

- Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4);
- Pasal 36;
- Tambahan Pasal 45C yang akan mengadopsi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Pasal 28 ayat (1) dan (2)
- Pasal 29

- A. rumusan "penghinaan/pencemaran nama baik" multtafsir dan dapat digunakan membungkam kritik  
B. memberikan kebebasan penuh bagi semua orang untuk menghina orang lain  
C. menjadikan semua kritik terhadap pemerintah sebagai tindak pidana  
D. menghapus hak masyarakat untuk mengakses informasi

E. milarang publik menggunakan media sosial

**KUNCI : A**

**Pembahasan**

**45. Tipe Soal: PILIHAN GANDA**

**Pertanyaan:**

Di sebuah desa terjadi perampasan tanah warga oleh oknum tertentu. Warga menuntut perlindungan hukum dari pemerintah. Hak konstitusional yang digunakan warga adalah ... .

- A. hak berpendapat
- B. hak atas pendidikan
- C. hak membentuk keluarga
- D. hak atas perlindungan diri dan harta
- E. hak ikut serta dalam pembelaan negara

**KUNCI : D**

**Pembahasan**

#### 46. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

##### Pertanyaan:

Perhatikan Infografis "Pasal-pasal Bermasalah Pada ITE" berikut untuk menjawab pertanyaan yang menyertai! Berdasarkan infografis "Pasal-Pasal Bermasalah Pada ITE" dinyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang defamasi sering dianggap bermasalah karena ... .

## Pasal-pasal Bermasalah pada UU ITE

\*Sumber diolah dari SAFEnet

**Klaster pertama: Kejahatan siber**

- Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan;
- Pasal 27 ayat (3) tentang defamasi;
- Pasal 28 ayat (2) tentang permusuhan dan kebencian;
- Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 tentang ancaman.

"Selain rumusan pasal yang tidak rigid sehingga menimbulkan multitafsir, pasal-pasal ini juga memiliki problem yuridis karena menimbulkan duplikasi aturan sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya pasal-pasal di klaster ini sebaiknya dihapuskan."

Damar Juniarto - Direktur Eksekutif SAFEnet

**Klaster kedua: Ancaman pidana**

- Pasal 36 sebagai pemberat hukuman atas tindak pidana Pasal 27 sampai Pasal 29. Rumusan pasal ini perlu dibatasi secara tegas, hanya dalam konteks hubungan konsumen dengan produsen.
- Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang ancaman pidana penjara bagi tindakan defamasi sebaiknya dihapus atau diubah pengaturannya mengikuti hukum perdata sebagaimana yang kini tengah menjadi tren hukum di masa modern.

**Sementara itu....**

Pemerintah juga mencatat terdapat sejumlah pasal dalam UU ITE yang seringkali menuai permasalahan, antara lain:

- Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4);
- Pasal 36;
- Tambahan Pasal 45C yang akan mengadopsi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Pasal 28 ayat (1) dan (2)
- Pasal 29

- A. rumusan "penghinaan/pencemaran nama baik" multitafsir dan dapat digunakan membungkam kritik
- B. memberikan kebebasan penuh bagi semua orang untuk menghina orang lain
- C. menjadikan semua kritik terhadap pemerintah sebagai tindak pidana
- D. menghapus hak masyarakat untuk mengakses informasi
- E. melarang publik menggunakan media sosial

47. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

Pertanyaan:

Perhatikan Infografis "Pasal-pasal Bermasalah Pada ITE" berikut untuk menjawab pertanyaan yang menyertai! Berdasarkan infografis "Pasal-Pasal Bermasalah Pada ITE" pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian dianggap bermasalah terutama karena ... .

**Pasal-pasal Bermasalah pada UU ITE**  
\*Sumber diolah dari SAFEnet

**Klaster pertama: Kejahatan siber**

- Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan;
- Pasal 27 ayat (3) tentang defamasi;
- Pasal 28 ayat (2) tentang permusuhan dan kebencian;
- Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 tentang ancaman.

**Klaster kedua: Ancaman pidana**

- Pasal 36 sebagai pemberat hukuman atas tindak pidana Pasal 27 sampai Pasal 29. Rumusan pasal ini perlu dibatasi secara tegas, hanya dalam konteks hubungan konsumen dengan produsen.
- Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang ancaman pidana penjara bagi tindakan defamasi sebaiknya dihapus atau diubah pengaturannya mengikuti hukum perdata sebagaimana yang kini tengah menjadi tren hukum di masa modern.

**Klaster ketiga: Pasal-pasal rentan disalahgunakan**

- Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi berpotensi dapat digunakan untuk melakukan sensor informasi alih-alih menjadi pengakuan atas hak privasi warga.
- Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) tentang kewenangan pemerintah dan pemutusan akses berpotensi melahirkan perbuatan yang sewenang-wenang dan pemerintah dapat memutus akses tanpa pengawasan.

**Sementara itu....**

Pemerintah juga mencatat terdapat sejumlah pasal dalam UU ITE yang seringkali menuai permasalahan, antara lain:

- Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4);
- Pasal 36;
- Tambahan Pasal 45C yang akan mengadopsi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Pasal 28 ayat (1) dan (2)
- Pasal 29

A. tidak bisa digunakan untuk kasus intoleransi  
B. mudah dipahami masyarakat

- C. membatasi akses media sosial sepenuhnya
- D. definisi 'kebencian' terlalu luas dan multitafsir
- E. tidak memiliki hubungan dengan kebebasan berpendapat

**KUNCI : D**  
**Pembahasan**

#### 48. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

##### Pertanyaan:

Perhatikan Infografis "Pasal-pasal Bermasalah Pada ITE" berikut untuk menjawab pertanyaan yang menyertai! Berdasarkan infografis "Pasal-Pasal Bermasalah Pada ITE" pembatasan terhadap kebebasan berbicara menurut UUD 1945 hanya dapat dilakukan jika ... .

**Pasal-pasal Bermasalah pada UU ITE**  
\*Sumber diolah dari SAFEnet

**Klaster pertama: Kejahatan siber**

- Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan;
- Pasal 27 ayat (3) tentang defamasi;
- Pasal 28 ayat (2) tentang permusuhan dan kebencian;
- Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 tentang ancaman.

**"Selain rumusan pasal yang tidak rigid sehingga menimbulkan multitafsir, pasal-pasal ini juga memiliki problem yuridis karena menimbulkan duplikasi aturan sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya pasal-pasal di klaster ini sebaiknya dihapuskan."**

Damar Juniarto - Direktur Eksekutif SAFEnet

**Klaster kedua: Ancaman pidana**

- Pasal 36 sebagai pemberat hukuman atas tindak pidana Pasal 27 sampai Pasal 29. Rumusan pasal ini perlu dibatasi secara tegas, hanya dalam konteks hubungan konsumen dengan produsen.
- Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang ancaman pidana penjara bagi tindakan defamasi sebaiknya dihapus atau diubah pengaturannya mengikuti hukum perdata sebagaimana yang kini tengah menjadi tren hukum di masa modern.

**Klaster ketiga: Pasal-pasal rentan disalahgunakan**

- Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi berpotensi dapat digunakan untuk melakukan sensor informasi alih-alih menjadi pengakuan atas hak privasi warga.
- Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) tentang kewenangan pemerintah dan pemutusan akses berpotensi melahirkan perbuatan yang sewenang-wenang dan pemerintah dapat memutus akses tanpa pengawasan.

**Sementara itu....**

Pemerintah juga mencatat terdapat sejumlah pasal dalam UU ITE yang seringkali menuai permasalahan, antara lain:

- Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4);
- Pasal 36;
- Tambahan Pasal 45C yang akan mengadopsi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Pasal 28 ayat (1) dan (2)
- Pasal 29

- A. berdasarkan perintah pejabat daerah
- B. tidak disukai oleh sebagian masyarakat
- C. ada tekanan politik dari kelompok tertentu
- D. diminta oleh pihak yang merasa dirugikan
- E. sesuai pasal 28J demi ketertiban, moral, atau keamanan

49. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

Pertanyaan:

Perhatikan Infografis "Pasal-pasal Bermasalah Pada ITE" berikut untuk menjawab pertanyaan yang menyertai! Berdasarkan infografis "Pasal-Pasal Bermasalah Pada ITE" pemerintah dapat memutus akses internet berdasarkan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b). Hal ini dianggap bermasalah karena ....

**Pasal-pasal Bermasalah pada UU ITE**  
\*Sumber diolah dari SAFEnet

**Klaster pertama: Kejahatan siber**

- Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan;
- Pasal 27 ayat (3) tentang defamasi;
- Pasal 28 ayat (2) tentang permusuhan dan kebencian;
- Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 tentang ancaman.

**"Selain rumusan pasal yang tidak rigid sehingga menimbulkan multitafsir, pasal-pasal ini juga memiliki problem yuridis karena menimbulkan duplikasi aturan sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya pasal-pasal di klaster ini sebaiknya dihapuskan."**

Damar Juniarto - Direktur Eksekutif SAFEnet

**Klaster kedua: Ancaman pidana**

- Pasal 36 sebagai pemberat hukuman atas tindak pidana Pasal 27 sampai Pasal 29. Rumusan pasal ini perlu dibatasi secara tegas, hanya dalam konteks hubungan konsumen dengan produsen.
- Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang ancaman pidana penjara bagi tindakan defamasi sebaiknya dihapus atau diubah pengaturannya mengikuti hukum perdata sebagaimana yang kini tengah menjadi tren hukum di masa modern.

**Klaster ketiga: Pasal-pasal rentan disalahgunakan**

- Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi berpotensi dapat digunakan untuk melakukan sensor informasi alih-alih menjadi pengakuan atas hak privasi warga.
- Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) tentang kewenangan pemerintah dan pemutusan akses berpotensi melahirkan perbuatan yang sewenang-wenang dan pemerintah dapat memutus akses tanpa pengawasan.

**Sementara itu....**

Pemerintah juga mencatat terdapat sejumlah pasal dalam UU ITE yang seringkali menuai permasalahan, antara lain:

- Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4);
- Pasal 36;
- Tambahan Pasal 45C yang akan mengadopsi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Pasal 28 ayat (1) dan (2)
- Pasal 29

A. dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan membatasi hak publik mengakses informasi  
B. akses internet bukan bagian dari kebebasan berekspresi

- C. mewajibkan penyedia layanan menutup semua platform
- D. pemutusan akses dilakukan tanpa dasar hukum lain
- E. hanya berlaku bagi pelaku kejahatan

**KUNCI : A**

**Pembahasan**

50. Tipe Soal: PILIHAN GANDA

Pertanyaan:

Perhatikan Infografis "Pasal-pasal Bermasalah Pada ITE" berikut untuk menjawab pertanyaan yang menyertai! Berdasarkan infografis "Pasal-Pasal Bermasalah Pada ITE", pernyataan Damar Juniarto dalam infografis menegaskan bahwa banyak pasal UU ITE bersifat multitasir. Konsekuensi terpenting dari kondisi ini adalah ....

**Pasal-pasal Bermasalah pada UU ITE**  
\*Sumber diolah dari SAFEnet

**Klaster pertama: Kejahatan siber**

- Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan;
- Pasal 27 ayat (3) tentang defamasi;
- Pasal 28 ayat (2) tentang permusuhan dan kebencian;
- Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 tentang ancaman.

**"Selain rumusan pasal yang tidak rigid sehingga menimbulkan multitasir, pasal-pasal ini juga memiliki problem yuridis karena menimbulkan duplikasi aturan sehingga memunculkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya pasal-pasal di klaster ini sebaiknya dihapuskan."**

Damar Juniarto - Direktur Eksekutif SAFEnet

**Klaster kedua: Ancaman pidana**

- Pasal 36 sebagai pemberat hukuman atas tindak pidana Pasal 27 sampai Pasal 29. Rumusan pasal ini perlu dibatasi secara tegas, hanya dalam konteks hubungan konsumen dengan produsen.
- Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang ancaman pidana penjara bagi tindakan defamasi sebaiknya dihapus atau diubah pengaturannya mengikuti hukum perdata sebagaimana yang kini tengah menjadi tren hukum di masa modern.

**Klaster ketiga: Pasal-pasal rentan disalahgunakan**

- Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi berpotensi dapat digunakan untuk melakukan sensor informasi alih-alih menjadi pengakuan atas hak privasi warga.
- Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) tentang kewenangan pemerintah dan pemutusan akses berpotensi melahirkan perbuatan yang sewenang-wenang dan pemerintah dapat memutus akses tanpa pengawasan.

**Sementara itu....**

Pemerintah juga mencatat terdapat sejumlah pasal dalam UU ITE yang seringkali menuai permasalahan, antara lain:

- Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4);
- Pasal 36;
- Tambahan Pasal 45C yang akan mengadopsi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Pasal 28 ayat (1) dan (2)
- Pasal 29

- A. semua pasal harus dipertahankan
- B. masyarakat bebas melanggar hukum
- C. penegak hukum tidak perlu aturan lain
- D. ketidakpastian hukum yang berpotensi mengekang kebebasan berbicara
- E. negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur opini publik dan mengambil kebijakan

**KUNCI : D**  
**Pembahasan**